

**PENDIDIKAN PANCASILA DALAM KURIKULUM MERDEKA****Bambang Yuniarto, Marwah lama'atushabakh, Maryanto, Amar Habibi**

IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Jawa Barat

Email : bb_yunior@yahoo.co.id, marwahlamaah078@gmail.com,
maryanto2882@gmail.com, amarhabibi1998@gmail.com**ABSTRAK**

Kata kunci:
Pendidikan,
Pancasila,
kurikulum
merdeka

Latar Belakang : Di Indonesia, isu pendidikan menjadi isu sentral dan bahkan diamanatkan oleh konstitusi untuk menjadi prioritas utama dalam anggaran belanja negara. Semua komponen mempunyai andil yang penting, tidak terkecuali kurikulum yang mana dapat dikatakan penyangga utama dalam sebuah proses belajar mengajar. Beberapa pakar bahkan mengatakan bahwa kurikulum merupakan jantung bagi pendidikan, baik buruknya hasil pendidikan ditentukan oleh kurikulum, apakah mampu membangaun kesadaran kritis terhadap peserta didik ataukah tidak.

Tujuan : untuk mengamati pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kehasan, kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik.

Metode : Jenis metode yang akan digunakan oleh penulis adalah studi Pustaka. Studi kepustakaan merupakan segala upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan suatu data informasi yang relevan dengan topik atau permasalahan yang diangkat.

Hasil : Kebijakan kampus merdeka, yang salah satu tataran praksisnya, difokuskan pada kegiatan akademik atau pembelajaran. Tentu perlu dianalisis dan dielaborasi melalui pendekatan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga meminimalisir terjadinya ketimpangan antara cita-cita dan realitas. Dalam konteks pembelajaran pada kebijakan kampus merdeka, sesungguhnya lebih mengarah pada upaya memberikan peluang lebih, agar mahasiswa menguasai disiplin ilmu yang beragam. Tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, pada era modern saat ini, perlu mengakomodir terbentuknya daya literasi digital, kreatifitas, inovasi, dan sifat kritis peserta didik.

Kesimpulan: Perkembangan kurikulum PPKn di Indonesia berkembang secara dinamis ini pada prinsipnya disesuaikan dengan kebutuhan serta visi-misi dari pemerintah yang mempengaruhi dalam pembentukan kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kekuatan yang menjadi fondasi dalam pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, politik, hukum, nilai, moral, kearifan lokal, dan kebhinekaan dalam berkebudayaan.

ABSTRACT

Background: In Indonesia, the issue of education is a central issue and is even mandated by the constitution to be the main priority in the state budget. All components have an important contribution, including the curriculum which can be said to be the main buffer in a teaching and learning process. Some experts even say that the curriculum is at the heart of education, whether or not educational outcomes are

Keywords:
Education,
Pancasila,
curriculum

determined by the curriculum, whether it is able to raise critical awareness of learners or not.

Purpose: *to observe national education and conformity with the desire, conditions, potential of the region, educational units and students..*

Method: *The type of method that will be used by the author is a Literature study. Literature study is any effort made by researchers to collect information data that is relevant to the topic or problem raised..*

Results: *The independent campus policy, which is one of the levels of praxis, is focused on academic or learning activities. Of course, it needs to be analyzed and elaborated through a scientific approach to Civic Education, so as to minimize the occurrence of inequality between ideals and reality. In the context of learning in the independent campus policy, it is actually more towards providing more opportunities, so that students master diverse disciplines. The learning objectives of Citizenship Education, in today's modern era, need to accommodate the formation of digital literacy, creativity, innovation, and the critical nature of students.*

Conclusion: *The development of the PPKn curriculum in Indonesia is developing dynamically, in principle adapted to the needs and visions and missions of the government that influence the formation of educational curriculum policies in Indonesia. However, in its implementation there is a strength that is the foundation in the implementation of the subjects of Pancasila and Citizenship Education, namely Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, politics, law, values, morals, local wisdom, and diversity in culture.*

PENDAHULUAN

Pembahasan tentang dunia pendidikan menjadi topik yang akan terus eksis dan masa ke masa. Di Indonesia, isu pendidikan menjadi isu sentral dan bahkan diamanatkan oleh konstitusi untuk menjadi prioritas utama dalam anggaran belanja negara. Pendidikan itu sendiri menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ialah “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Pengertian ini seringkali tidak dicermati dengan betul bahwa konstitusi kita mengamanatkan sebuah upaya mengembangkan “potensi” yang di dalamnya terdapat banyak hal, artinya tidak hanya perkara kognitif saja, melainkan juga mengembangkan psikomotorik dan afektif.

Dalam rangka upaya mengembangkan potensi siswa atau peserta didik, maka dalam dunia pendidikan diperlukan kurikulum. (Asri, 2017) menyatakan bahwa “Dalam dunia pendidikan terdapat beberapa komponen yang saling bersinergi agar mampu mewujudkan tujuan pendidikan itu sendiri. Semua komponen mempunyai andil yang penting, tidak terkecuali kurikulum yang mana dapat dikatakan penyangga utama dalam sebuah proses belajar mengajar. Beberapa pakar bahkan mengatakan bahwa kurikulum merupakan jantung bagi pendidikan, baik buruknya hasil pendidikan ditentukan oleh kurikulum, apakah mampu membangaun kesadaran kritis terhadap peserta didik ataukah tidak”.

Pembahasan kurikulum di Indonesia ini sangatlah menarik. Hal ini dikarenakan begitu dinamisnya perubahan yang terjadi dalam perkembangan kurikulum Indonesia. Bahkan (Raharjo, 2020) memaparkan bahwa “Ada ungkapan menggelitik yang acapkali muncul seiring perubahan penguasa negeri ini yakni ‘ganti menteri ganti kurikulum’, nyatanya dalam perjalanan sejarah sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional memang telah berulang kali mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2004, 2006 serta yang terbaru

adalah kurikulum 2013". Ditambah, saat ini sudah ada pandangan baru terkait dengan kurikulum merdeka belajar.

Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, sistem kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan memang perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Adapun kurikulum itu sendiri, menurut Schubert (1986), memaparkan bahwa "*curriculum as content or subject matter, curriculum as a program of planned activities, curriculum as intended learning outcomes, curriculum as cultural reproduction, curriculum as experience, curriculum as discrete task and concepts, curriculum as an agenda for social reconstruction*". Pandangan tersebut tampaknya dipengaruhi oleh pandangan sebelumnya, seperti Stratemeyer, Forkner, dan McKim (194) yang menyatakan "*Curriculum currently defined in three ways; the courses and class activities in which children and youth engage; the total range of in class and out class experiences sponsored by school; and the total life experiences of the learner*". Dengan demikian, kurikulum dapat dikatakan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang penyelenggaraan proses kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kehasan, kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan proses kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kehasan, kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik.

METODE PENELITIAN

Jenis metode yang akan digunakan oleh penulis adalah studi Pustaka (Darmalaksana, 2020). Studi kepustakaan merupakan segala upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan suatu data informasi yang relevan dengan topik atau permasalahan yang diangkat. Data informasi yang telah dihimpun tersebut berasal dari studi kepustakaan, baik berupa buku, artikel, maupun jurnal. Dibutuhkan ketekunan dan ketelitian dalam melakukan studi kepustakaan untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam studi pustaka, hal yang dilakukan ialah membaca dan menelaah literatur yang dianggap sesuai dengan pokok kajian. Setelah menelaah berbagai literatur kemudian dituangkan secara teoritis terkait dengan penguatan Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka.

Penelitian kualitatif tidak dibatasi oleh kategori tertentu, karena sifatnya yang elaboratif dan mendalam (Rukajat, 2018). Sumber literatur pada penelitian ini berfokus pada jurnal, yang didukung oleh sumber yuridis serta dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara dan lembaga resmi, baik nasional maupun internasional. Dijadikannya jurnal sebagai sumber literasi primer, karena jurnal memiliki tingkat keabsahan yang tinggi, agar tidak terjadi kesalahan pada analisis data yang sifatnya konseptual dan prosedural, tentu perlu didukung oleh data sekunder. Teknik analisis data pada riset ini menggunakan teknik Miles dan Huberman (1992) yang mengungkapkan bahwa proses analisis kualitatif berfokus pada: reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan (Firman & Rahayu, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi kurikuler, berfokus pada kegiatan pembelajaran. Realitas tersebut, merupakan upaya dalam membentuk warga negara yang baik dan cerdas. Pada dasarnya bagaimana warga negara bersedia untuk berpartisipasi dalam kepentingan umum, memiliki kepekaasaan sosial yang baik, turut andil dalam menjaga persatuan nasional, serta mengisi kemerdekaan melalui peran aktifnya, apabila tidak diberikan landasan mengenai pengetahuan, pemahaman, serta pembentukan moral. Winataputra dan Budimansyah (Nurdin, 2016) mengungkapkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi kurikuler, bertujuan untuk mengoptimalkan potensi peserta didik, agar menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, demokratis dan berkomitmen.

Kebijakan kampus merdeka, yang salah satu tataran praksisnya, difokuskan pada kegiatan akademik atau pembelajaran. Tentu perlu dianalisis dan dielaborasi melalui pendekatan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga meminimalisir terjadinya ketimpangan antara cita-cita dan realitas. Idealnya substansi pembelajaran dalam kebijakan kampus merdeka perlu merepresentasikan semangat dan nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945. Sebagai kajian yang komprehensif, PKn berkompeten dalam melaksanakan evaluasi kebijakan publik, khususnya pada tataran mengakomodir partisipasi serta memberikan ruang agar menumbuhkan tanggung jawab public (Shabrina, 2016).

Dalam konteks pembelajaran pada kebijakan kampus merdeka, sesungguhnya lebih mengarah pada upaya memberikan peluang lebih, agar mahasiswa menguasai disiplin ilmu yang beragam. Dalam upaya menganalisis kebijakan kampus merdeka melalui dimensi PKn kurikuler, tidak harus selalu dengan mengontrak mata kuliah PKn. Lazimnya PKn sebagai mata kuliah wajib, dikontrak oleh mahasiswa pada awal memasuki perguruan tinggi, baik di semester 1, maupun semester 2. Dengan orientasi landasan filosofis pembelajaran PKn harus hadir, sehingga kampus merdeka dalam realitas implementasinya menjadi pembelajaran yang demokratis, terstruktur, adil, menyenangkan, serta berorientasi pada peningkatan kompetensi kewarganegaraan mahasiswa.

Dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi, dijelaskan bahwa pembelajaran di luar prodi bagi mahasiswa yang berminat, dapat dibagi menjadi 4 yaitu, 1) di prodi lain dalam kampus yang sama, 2) di prodi yang sama dalam kampus yang berbeda, 3) di prodi lain dalam kampus yang berbeda dan 4) pembelajaran non-kampus. Tentu kebijakan tersebut akan berhasil, apabila setiap perguruan tinggi berkomunikasi untuk menentukan teknis kerja samanya. Peran Pendidikan Kewarganegaraan, dalam menyukseskan kebijakan tersebut, berfokus pada upaya memberikan informasi objektif mengenai, pentingnya mengakomodir hak mahasiswa, memberikan ruang lebih bagi mahasiswa untuk berkarya serta mencari pengalaman, bahkan memberikan deskripsi mengenai pentingnya mengeksplorasi diri, agar kehidupan mahasiswa lebih bermakna. Tentu proses belajar di luar prodi serta di luar perguruan tinggi mahasiswa terkait, begitu merepresentasikan keilmuan PKn, karena bersifat multikultural dan menjadi upaya pengenalan budaya lokal.

Tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, pada era modern saat ini, perlu mengakomodir terbentuknya daya literasi digital, kreatifitas, inovasi, dan sifat kritis peserta didik, juga perlu menjadikan berbagai permasalahan sosial sebagai sumber pembelajaran PKn kontekstual (Martini, 2018). Dalam konsep kampus merdeka, ditekankan mengenai pentingnya penguasaan keterampilan yang beragam. Dengan orientasi memiliki modal sosial yang lebih agar menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing dan unggul. Idealnya sebagai keilmuan yang bertujuan

untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara beradab, tentu PKN pada tataran filosofis, teori dan praktiknya, perlu menjadi semangat para pendidik dan birokrat, sehingga implementasi kebijakan kampus merdeka, bisa efektif dan sesuai dengan yang diharapkan.

Realitas konsep pembelajaran pada pendidikan tinggi, yang dijelaskan melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020, menjadi bentuk aktualisasi kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam tataran substansi dan praksis dari konsep kampus merdeka yang memiliki kesamaan konsep dengan kajian Pendidikan Kewarganegaraan, akan dianalisis dan direfleksikan. Sebagai upaya menemukan jawaban ilmiah yang sifatnya komprehensif, yang menjadi implementasi nyata dalam memperkaya kajian keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan. Khususnya pada bentuk pembelajaran kampus merdeka yang berfokus pada pertukaran pelajar, asistensi mengajar pada satuan pendidikan, penelitian, bahkan magang atau praktik kerja yang menuai pro dan kontra, akan dianalisis melalui dimensi PKN kurikuler.

1. Kurikulum 2020 “Merdeka Belajar”

Pada prinsipnya, terkait dengan Kurikulum Merdeka Belajar 2020 ini, didasari oleh Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang SN-Dikti. Mendikbud di Era ini (Nadiem Makarim) menjadi tokoh penggagas terkait dengan wacana merdeka belajar, utamanya di Perguruan Tinggi. Menurut Nadiem, Kemendikbud menyiapkan strategi yang tidak akan keluar dari esensi pendidikan, yakni kualitas guru. Guru tidak akan mungkin bisa digantikan teknologi. Teknologi adalah alat bantu guru meningkatkan potensi mereka dan mencari guru-guru penggerak terbaik serta memastikan mereka bisa menjadi pemimpin- pemimpin pembelajaran dalam sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

Dikutip dari (Raharjo, 2020) Nadiem Makarim menjelaskan setidaknya tiga poin utama dalam gagasan merdeka belajar, yaitu teknologi untuk akselerasi, keberagaman sebagai esensi, dan profil pelajar Pancasila. Tentu saja, poin pertama terkait dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Namun ada hal yang sangat menarik yaitu di poin 2 dan 3, utamanya terkait dengan PPKn, bahwa adanya penguatan keberagaman sebagai esensi, berupa “keberagaman minat dan kemampuan yang dimiliki siswa menjadi alasan paling kuat agar pengukuran kinerja siswa tidak boleh dinilai hanya menggunakan angka-angka pencapaian akademik, tetapi juga berbagai macam aktivitas lain atau ekstrakurikuler”. Kearifan lokal juga merupakan unsur penting dalam pembelajaran. Setiap siswa akan lebih memahami materi bila menggunakan konteks lokal. “Setiap murid akan melihat semua mata pelajaran dan semua materi dalam konteks”. Kemudian terkait dengan profil pelajar Pancasila, Dalam kesempatan yang sama, Mendikbud Nadiem menjelaskan salah satu mandat yang diberikan Presiden adalah penyesuaian kurikulum yang bertujuan mewujudkan profil para pelajar di Indonesia. Kemendikbud telah menetapkan enam indikator sebagai profil pelajar Pancasila. Adapun enam profil tersebut adalah pertama, bernalar kritis agar bisa memecahkan masalah. Hal ini berhubungan dengan kemampuan kognitif. Kedua, kemandirian, yaitu siswa secara independen termotivasi meningkatkan kemampuannya, bisa mencari pengetahuan serta termotivasi. Ketiga, adalah kreatif, di mana siswa bisa menciptakan hal baru, berinovasi secara mandiri, dan mempunyai rasa cinta terhadap kesenian dan budaya.

Keempat, gotong-royong, di mana siswa mempunyai kemampuan berkolaborasi yang merupakan softskill utama yang terpenting di masa depan agar bisa bekerja secara tim. Kelima, kebinekaan global yang merupakan upaya agar siswa mencintai keberagaman budaya, agama dan ras di negaranya serta dunia,

sekaligus menegaskan mereka juga warga global. Keenam, berakhlak mulia. Di sinilah moralitas, spiritualitas, dan etika berada. "Sudah pasti pendidikan karakter akan menjadi salah satu pilar inti," tegas Mendikbud. Project based learning menjadi salah satu metode melatih jiwa gotong royong dan kreativitas siswa. "Bukan hanya dengan membaca materi lalu diuji, melainkan juga untuk menciptakan karya. Oleh karena itu saya mempunyai motto, kalau kita ingin melakukan transformasi pembelajaran di dalam suatu ruang kelas maka harus banyak tanya, banyak coba, banyak karya"

2. Bagaimana Analisis Konsep Kampus Merdeka Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Dimensi Sosio- Kultural?

Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi sosio-kultural, berfokus pada upaya memberdayakan masyarakat. Tentu sebagai keilmuan yang memiliki tugas berat, karena membentuk kepribadian warga negara. PKn menjadi kajian yang luas tidak terbatas sebagai pembelajaran di sekolah saja, tetapi juga dalam masyarakat umum, baik sebagai pendidikan demokrasi bagi masyarakat, maupun menjadi kajian dalam menganalisis dan merefleksikan dinamika, fenomena, realitas yang terjadi dimasyarakat. Cogan (Mukhtarom, Arwen, & Kurniyati, 2019) menjelaskan terdapat perbedaan makna antara civic education dan citizenship education, khususnya pada ruang lingkup kajiannya, civic education merupakan PKn dalam arti sempit atau PKn dalam bentuk pendidikan formal (sekolah), sedangkan *citizenship education* adalah PKn dalam arti yang luas, sebagai bentuk pendidikan non formal (pendidikan bagi masyarakat) (Geboers, Geijssel, Admiraal, & Ten Dam, 2013).

Tentu masyarakat yang berdaya dan beradab menjadi tujuan penting dijadikannya PKn sebagai wahana pendidikan demokrasi bagi masyarakat umum. Sehingga mampu mengisi kemerdekaan melalui keterlibatan aktifnya. Masyarakat berdaya dalam artian mampu, berkompeten serta mandiri untuk mengoptimalkan berbagai potensi yang ada disekitarnya, seperti dalam sektor ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, demokrasi, dan keamanan. Masyarakat yang beradab tentu, memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehingga secara sukarela menjalankan perannya, agar memiliki manfaat positif terhadap masyarakat, karena kompleksnya permasalahan yang ada dimasyarakat, tidak bisa diselesaikan oleh pihak berwajib saja, tetapi secara holistik, sehingga butuh peran aktif dari masyarakat, agar masalah tersebut selesai sebagaimana mestinya.

Faktanya sebagai keilmuan yang menganalisis dan merefleksikan dinamika, fenomena dan realitas yang terjadi pada kehidupan masyarakat secara holistik, tentu Pendidikan Kewarganegaraan memiliki solusi ilmiah dalam mengatasi berbagai persoalan sosial yang terjadi. Khususnya melalui strategi serta upaya penyelesaian masalah berbasis melibatkan semua pihak. Selain merepresentasikan integrasi bangsa, juga memberi makna, mengenai pentingnya demokrasi, peka sosial dan tanggung jawab. (Rahmandani & Samsuri, 2019) mengungkapkan bahwa sebagai pendidikan bagi masyarakat, tentu PKn berperan dalam memperkuat kesadaran masyarakat, untuk terlibat aktif dalam kegiatan publik, melalui pendekatan keilmuan yang humanis, yang praktik sosialisasinya dilakukan oleh kaum intelektual maupun pemerintah.

Dalam konsep kampus merdeka, faktanya mengakomodir strategi dan upaya untuk memberdayakan seluruh masyarakat. Khususnya melalui partisipasi aktif dari mahasiswa, dalam bentuk pengabdian pada masyarakat. Termasuk pada upaya untuk mewujudkan integrasi sosial, yang menjadi modal penting dalam mengatasi berbagai masalah yang menjadi penghambat dalam terwujudnya kesejahteraan umum pada kehidupan masyarakat. (Yunita & Suryadi, 2018) mengungkapkan bahwa

mahasiswa dalam menjalankan kewajiban bela negara, bisa melalui pengoptimalan perannya dimasyarakat, guna mewujudkan persatuan dan kesejahteraan sosial.

Faktanya, kebijakan kampus merdeka, dalam konteks tujuannya, tidak hanya mengakomodir strategi dan upaya pemberdayaan serta penyejahteraan bagi masyarakat saja, yang merupakan domain utama kajian PKn sosio-kultural. Tetapi juga membentuk mahasiswa agar memiliki kompetensi kewarganegaraan yang baik, dengan rasionalisasi, tidak hanya berfokus pada penguasaan civic knowledge, tetapi komprehensif, termasuk pada penguasaan *civic disposition* dan *civic skills*, sehingga menjadi warga negara yang beradab (*civic virtue*) (Nanggala & Suryadi, 2020). Tentu, bangsa ini akan mendapat berbagai manfaat positif, apabila kebijakan kampus merdeka diterapkan dengan penuh komitmen dan tidak prosedural. Khususnya yang bentuk pembelajaran dalam konsep kampus merdeka yang berkaitan langsung dengan masyarakat atau yang menjadi objek kajian Pendidikan Kewarganegaraan dimensi sosio-kultural.

Bentuk pembelajaran dalam konsep kampus merdeka, yang dijelaskan melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi, tentu akan dianalisis melalui kajian PKn, khususnya dimensi sosio-kultural. Dengan orientasi menemukan relevansi, mengenai tujuan program tersebut dengan tujuan kajian PKn dimensi sosio-kultural, juga sebagai upaya kolaborasi dan elaborasi, antara kebijakan pemerintah, dibidang pendidikan dengan kajian Pendidikan Kewarganegaraan yang pada substansinya berfokus pada masalah keilmuan, kemanusiaan, kemasyarakatan dan kebangsaan. Kegiatan menganalisis konsep kampus merdeka tersebut, melalui kajian PKn dimensi sosio-kultural, akan difokuskan pada bentuk pembelajaran yang dijelaskan oleh Permendikbud di atas, yaitu kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, proyek independen, serta membangun desa atau KKN tematik. PKn dalam dimensi sosio-kultural, tidak hanya menjadi bentuk pembelajaran yang dikhususkan kepada masyarakat, tetapi juga memberi deskripsi mengenai realitas yang terjadi, sehingga menjadi acuan bagi kaum intelektual untuk menyusun upaya ilmiah dalam mengatasi masalah yang ada (Tiara & Yarni, 2019).

Dijelaskan melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020, bahwa kewirausahaan merupakan salah satu bentuk pembelajaran dari kebijakan kampus merdeka. Substansi tujuan dari kegiatan wirausaha adalah untuk membentuk minat dan bakat berwirausaha bagi mahasiswa, serta sebagai upaya dalam mengatasi masalah mengenai kemiskinan dan pengangguran dimasyarakat. Faktanya dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan terdapat konsep *economic civic*, yang tentu memiliki relevansi, dengan kewirausahaan yang menjadi bentuk pembelajaran kampus merdeka. *Economic civic* atau ekonomi warga negara, merupakan kajian sekaligus kegiatan yang berfokus pengenalan konsep dan prinsip ekonomi kepada warga negara, sebagai strategi dan upaya memberdayakan ekonominya, agar menjadi warga negara atau komunitas masyarakat yang berdikari (Rube'i, 2014).

KESIMPULAN

Perkembangan kurikulum PPKn terjadi sangat dinamis, dalam hal secara normative maupun substansi, PPKn mengalami proses perjalanan cukup panjang. Dimulai dari pertama muncul tahun 1957 dengan nama civics (kewarganegaraan) Tahun 1959 di introdusir pelajaran pelajaran civics dengan “Civics Manusia Indonesia Baru” dan “Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (TUBAPI) sebagai buku sumber, tahun 1962 istilah civics diganti dengan Kewargaan Negara, tahun 1968 Kewarga Negara di ganti dengan Pendidikan Kewargaan Negara. Tahun 1975 Pendidikan Kewargaan Negara di ganti dengan PMP

(Pendidikan Moral Pancasila), tahun 1978 sangat dominannya materi P-4 dalam PMP. Tahun 1984 masih dengan nama PMP, tahun 1994 di ganti dengan nama PPKn. Tahun 1999 materi P-4 dicabut. Era reformasi di rubah dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), yang kemudian pada tahun 2013 kembali lagi menjadi PPKn.

Perkembangan kurikulum PPKn di Indonesia berkembang secara dinamis ini pada prinsipnya disesuaikan dengan kebutuhan serta visi-misi dari pemerintah yang mempengaruhi dalam pembentukan kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kekuatan yang menjadi fondasi dalam pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, politik, hukum, nilai, moral, kearifan lokal, dan kebhinekaan dalam berkebudayaan.

Begitu dinamisnya perkembangan kurikulum khususnya di bidang PPKn, ini tidak lepas dari perkembangan situasi politik hukum negara Indonesia. Bahkan, Samsuri (2012) memaparkan bahwa “besarnya kepentingan rezim kekuasaan terhadap pendidikan kewarganegaraan model PMP tersebut, mengakibatkan terjadinya reduksionisme misi mata kajian itu dalam kerangka membentuk warga negara yang baik. Reduksi itu nampak Ketika pendidikan Pancasila yang dieksplisitkan dengan label PMP, seakan-akan menjadi satu-satunya mata pelajaran yang harus bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter warga negara, khususnya kepada generasi muda”.

Bagi akademisi, khususnya di bidang PPKn, sudah sepatutnya kita peduli dan terus menganalisis bagaimana perkembangan bidang kajian PPKn baik secara normatif, maupun substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, Muhammad. (2017). Dinamika Kurikulum Di Indonesia. *Modeling: Jurnal Program Studi Pgmi*, 4(2), 192–202.
- Darmalaksana, Wahyudin. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan*. Pre-Print Digital Library Uin Sunan Gunung Djati Bandung.
- Firman, Firman, & Rahayu, Sari. (2020). Pembelajaran Online Di Tengah Pandemi Covid-19. *Indonesian Journal Of Educational Science (Ijes)*, 2(2), 81–89.
- Geboers, Ellen, Geijsel, Femke, Admiraal, Wilfried, & Ten Dam, Geert. (2013). Review Of The Effects Of Citizenship Education. *Educational Research Review*, 9, 158–173.
- Martini, Eneng. (2018). Membangun Karakter Generasi Muda Melalui Model Pembelajaran Berbasis Kecakapan Abad 21. *Jpk (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 3(2), 21–27.
- Mukhtarom, Asrori, Arwen, Desri, & Kurniyati, Ety. (2019). Urgensi Civic Education Dalam Kehidupan Bernegara. *Tadarus Tarbawy: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 1(2).
- Nanggala, Agil, & Suryadi, Karim. (2020). Analisis Konsep Kampus Merdeka Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10–23.
- Nurdin, Encep Syarief. (2016). Analisis Konten Dimensi Implementasi Kebijakan Publik Pada Konten Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi. *Sosiohumanika*, 9(1).
- Raharjo, Raharjo. (2020). Analisis Perkembangan Kurikulum Ppkn: Dari Rentjana Pelajaran 1947 Sampai Dengan Merdeka Belajar 2020. *Pkn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 15(1), 63–82.
- Rahmandani, Fahdian, & Samsuri, Samsuri. (2019). Malang Corruption Watch Sebagai Gerakan Masyarakat Sipil Dalam Membangun Budaya Anti-Korupsi Di Daerah.

Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 21(1), 49–59.

- Rube'i, Muhammad Anwar. (2014). Integrasi Nilai-Nilai Kewirausahaan Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Membentuk Economic Civic (Ekonomi Warganegara): Studi Kasus Pembentukan Ekonomi Warga Negara Di Sma Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Rukajat, Ajat. (2018). Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach. Deepublish.
- Shabrina, Tasya Fildzah. (2016). Implementasi Gerakan Citarum Bestari Dalam Menumbuhkan Civic Responsibility Terhadap Lingkungan:(Studi Kasus Pada Masyarakat Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat). Universitas Pendidikan Indonesia.
- Tiara, Monica, & Yarni, Nevi. (2019). Pendidikan Karakter Berwawasan Sosiokultural Di Sma Kota Padang. Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp), 2(2), 297–302.
- Yunita, Yunita, & Suryadi, Karim. (2018). Rancang Bangun Pendidikan Bela Negara Sebagai Wahana Pengembangan Sikap Nasionalisme Bagi Mahasiswa. Modeling: Jurnal Program Studi Pgmi, 5(2), 225–233.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).